

## **BAB IV**

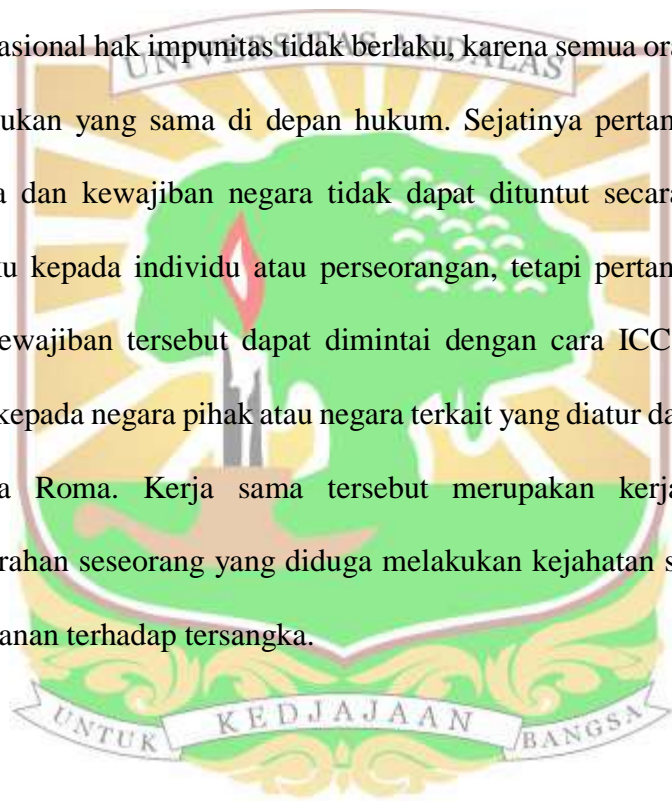
### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat memnarik kesimpulan yang sebagai berikut:

1. Peran ICC dalam penyelesaian kejahatan internasional di Darfur Republik Sudan telah melakukan beberapa tindakan. Pertama, ICC telah melakukan penyidikan terhadap kejahatan yang terjadi di Darfur setelah diajukan oleh Dewan Keamanan PBB pada bulan Maret tahun 2005. Dalam penyidikan ini, ada tiga kejahatan yang terjadi antara lain, kejahatan genosida (Pasal 6), kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 7), dan kejahatan perang (Pasal 8). Tidak hanya menghasilkan beberapa tindak kejahatan, tetapi juga menguak para pelaku kejahatan yang diduga berperan melakukan kejahatan tersebut. Pelaku kejahatan tersebut menyeret para pejabat Pemerintah Republik Sudan yaitu, Presiden Sudan Omar Hasan Al-Bashir, Menteri Masalah Kemanusiaan Ahmad Harun, Pemimpin Milisi Janjaweed Ali Kushayb, dan Menteri Pertahanan Abdel Rahim M Husein. Semua proses penyidikan yang telah dilaksanakan oleh ICC dilakukan atas dasar peraturan yang ditetapkan dalam Statuta Roma tahun 1998 sebagai dasar hukum pelaksanaan peran ICC. Setelah penetapan tersangka, ICC harus mengeluarkan surat penahanan atau pemanggilan yang berdasarkan pada Pasal 58 Statuta, tetapi hingga dua kali surat tersebut dilayangkan tidak ada tanggapan dari para tersangka sehingga proses tersebut belum terlaksana.

2. Dalam penyelesaian kejahatan internasional oleh ICC yang terjadi di Darfur memerlukan suatu tanggung jawab dan kewajiban negara dalam penegakan hukumnya. Prinsip pertanggung jawaban negara yang terjadi di Darfur merupakan prinsip *original responsibility* yang mana pertanggung jawaban negara yang lahir karena adanya tindakan individu yang dilarang oleh hukum. Tindakan tersebut merupakan tindakan yang lahir dari para pejabat negara atau pemerintah itu sendiri sehingga dalam hukum pidana internasional hak impunitas tidak berlaku, karena semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Sejatinya pertanggung jawaban negara dan kewajiban negara tidak dapat dituntut secara pidana hanya berlaku kepada individu atau perseorangan, tetapi pertanggung jawaban dan kewajiban tersebut dapat dimintai dengan cara ICC meminta kerja sama kepada negara pihak atau negara terkait yang diatur dalam pasal-pasal Statuta Roma. Kerja sama tersebut merupakan kerja sama dalam penyerahan seseorang yang diduga melakukan kejahatan serta melakukan penahanan terhadap tersangka.



## **B. Saran**

Dalam hal ini beberapa permasalahan dan kendala yang timbul, memerlukan suatu pembaharuan. Penulis memberikan beberapa saran dalam rangka mencapai cita hukum yang diinginkan oleh masyarakat terhadap peranan pengadilan pidana internasional terhadap kejahatan internasional, sebagai berikut:

1. Dalam penyelesaian kejahatan internasional, ICC harus melaksanakan perannya sesuai dengan yang diatur dalam Statuta Roma. Bahkan ICC harus

meluruskan dan memperbaiki sistem peradilanannya dan mempertergas setiap aturan yang telah termaktub dalam Statuta Roma sehingga memberikan peradilan yang adil dan mempunyai putusan yang mengikat. Sehingga tidak adanya kendala dalam setiap proses yang akan dilakukan.

2. Tanggung jawab dan kewajiban dari suatu negara sangat diperlukan bagi ICC untuk melaksanakan perannya dalam menyelesaikan kejahatan internasional. Tanggung jawab dan kewajiban negara ini harus dipertegas oleh ICC, agar setiap negara melaksanakan peranya dalam menyelesaikan kejahatan internasional. Sehingga tidak ada negara yang tidak menanggapi permintaan ini, jika perlu diadakannya suatu aturan yang mengatur tentang hukuman bagi negara yang tidak menanggapi permintaan kerja sama oleh ICC sebagai bentuk kerja sama dalam menyelesaikan kejahatan internasional.

